DINAMIKA JARINGAN PATRONASE POLITIK DI KOTA BANJARMASIN PASCAPEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Aron Richardo Sinaga
NPP. 33.0769
Asdaf Kota Banjarmasin , Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: sinagaaron117@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S. Sos, M.Si
Email: baharthahir6@gmail.com

ABSTRACT

(***Problem Statement/Background (GAP):*** *The relocation of the provincial capital of South Kalimantan from Banjarmasin to Banjarbaru under Law No. 8 of 2022 has altered the local power configuration and affected patron-client relations in Banjarmasin. However, studies that specifically explain how the loss of capital status influences the structure, resources, and adaptive strategies of political patronage networks in the left-behind city remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the dynamics of political patronage networks in Banjarmasin following the relocation of the provincial capital of South Kalimantan.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving government actors, community leaders, and affected residents, and were analyzed using Miles, Huberman, dan Saldaña's interactive analysis technique and James C. Scott's patronage theory.* ***Result:*** *The findings show that the capital relocation did not dismantle political patronage networks in Banjarmasin, but instead pushed them to become more localized, flexible, and adaptive. This shift is reflected in the movement of resources from provincial bureaucratic access to local resources, the continued face-to-face relations between elites and communities, and the adjustment of distribution channels through economic programs, social assistance, and the strengthening of social bases.* ***Conclusion:*** *Political patronage networks in Banjarmasin remain resilient after the relocation of the capital, but in a more localized and dynamic form. This finding confirms that administrative change does not necessarily weaken patronage; instead, it can trigger the reorganization of local power strategies.*
Keywords: *Dynamics, Network, Patronage, Politics, Post-relocation*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah mengubah konfigurasi kekuasaan lokal dan memengaruhi pola relasi patron-klien di Banjarmasin. Namun, penelitian yang secara khusus menjelaskan bagaimana hilangnya status ibu kota memengaruhi struktur, sumber daya, dan strategi adaptasi jaringan patronase politik di kota yang ditinggalkan masih sangat terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin pascapemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap aktor pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga yang

terdampak, lalu dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman serta teori patronase James C. Scott. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak memutus jaringan patronase politik di Banjarmasin, tetapi mendorongnya bertransformasi menjadi lebih lokal, fleksibel, dan adaptif. Perubahan ini tampak pada bergesernya sumber daya dari akses birokrasi provinsi ke sumber daya lokal, tetap dipertahankannya relasi tatap muka antara elit dan masyarakat, serta penyesuaian saluran distribusi melalui program ekonomi, bantuan sosial, dan penguatan basis sosial. **Kesimpulan:** Jaringan patronase politik di Banjarmasin tetap bertahan pascapemindahan ibu kota, tetapi dalam bentuk yang lebih terlokalisasi dan dinamis. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan status administratif tidak selalu melemahkan patronase, melainkan dapat mendorong reorganisasi strategi kekuasaan lokal.
Kata kunci : Dinamika, Jaringan, Patronase, Politik, Pascapemindahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemindahan ibu kota daerah merupakan salah satu kebijakan strategis paling kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan karena implikasinya melampaui dimensi teknis-administratif dan merambah ke ranah politik, sosial, serta ekonomi. Di Indonesia, fenomena ini kembali mengemuka seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara resmi memindahkan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah peta administratif wilayah, melainkan memicu disrupsi ekosistem kekuasaan lokal yang secara fundamental memengaruhi distribusi kekuasaan, akses sumber daya, dan pola hubungan antar-aktor politik di kedua wilayah tersebut. Dalam kajian politik Indonesia, patronase dan klientelisme masih menjadi pola yang kuat dalam relasi kekuasaan, terutama ketika akses terhadap sumber daya dan dukungan politik dipertukarkan melalui jejaring informal. Praktik patronase juga terbukti sering muncul dalam kontestasi politik melalui pemberian material, janji politik, dan penggunaan jabatan untuk memengaruhi pilihan politik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi (Hanif, 2009).

Secara historis, pemindahan ini sebenarnya melunasi rancangan lama Gubernur Dr. Murdjani pada era 1950-an, yang menilai Banjarmasin kurang ideal sebagai pusat pemerintahan akibat kondisi fisiknya yang didominasi rawa dan rawan banjir. Secara yuridis, regulasi baru ini juga sekaligus memperbarui hukum tata pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1956 yang masih mengacu pada konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam konteks pembangunan makro, Banjarbaru kini diproyeksikan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekaligus pusat administrasi, sementara Banjarmasin diarahkan menjadi pusat perdagangan dan pariwisata berbasis sungai melalui konsep metropolitan Banjar Bakula. Kendati demikian, kebijakan ini menuai resistensi politik, salah satunya melalui upaya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang menilai proses pembentukan undang-undang tersebut mengabaikan aspek transparansi serta landasan sosiologis yang kuat.

Perdebatan tersebut mengonfirmasi bahwa pemindahan ibu kota merupakan arena perebutan kepentingan yang berlapis. Dalam perspektif ilmu politik, pergeseran pusat pemerintahan secara otomatis mengubah lanskap kekuasaan lokal. Ibu kota secara tradisional berfungsi sebagai pusat pengaturan distribusi anggaran, aliran proyek pembangunan, mutasi jabatan birokrasi, dan kanal akses politik yang menjadi instrumen utama dalam praktik

patronase. Konteks desentralisasi Indonesia adalah distribusi kewenangan dari pusat ke daerah membawa konsekuensi langsung terhadap restrukturisasi peta kekuasaan lokal, di mana kedudukan ibu kota daerah menjadi titik sentral dalam sistem distribusi sumber daya dan pengaruh politik. Ketika atribut-atribut strategis ini lepas dari Kota Banjarmasin, jaringan kekuasaan informal yang selama ini mapan menghadapi tekanan struktural yang memaksa para aktor politik di dalamnya melakukan reorientasi strategi secara mendasar. Dalam jurnal Saputra et al. (2025) Prof. Sadu Wasistiono menekankan pentingnya pendekatan yang luwes dalam memahami kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sekaligus menghadapi berbagai tantangan baru dalam konteks pemerintahan yang kian kompleks.

Jaringan patronase politik berupa relasi asimetris berbasis timbal balik antara patron yang menguasai sumber daya dan klien yang memberikan loyalitas merupakan mekanisme informal yang sangat berpengaruh dalam politik lokal. Hubungan timbal balik ini menuntut adanya pertukaran yang saling menguntungkan, di mana kepatuhan dan dukungan politik dari akar rumput dibalas dengan jaminan proteksi serta akses materi oleh elit. Praktik patronase juga sering muncul dalam kontestasi politik melalui pemberian material, janji politik, dan penggunaan jabatan untuk memengaruhi pilihan politik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi (Rohmah, 2025). Pola hubungan informal seperti ini sangat bergantung pada kontinuitas aliran sumber daya strategis yang dikendalikan oleh para aktor di tingkat atas. Oleh karena itu, ketika sumber daya utama yang melekat pada status pusat pemerintahan bergeser, struktur dan stabilitas jaringan ini secara inheren akan mengalami guncangan hebat.

Kondisi struktural Kota Banjarmasin pascapemindahan ibu kota memicu kerentanan nyata terhadap keberlangsungan relasi tersebut. Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (2025) menunjukkan bahwa Banjarmasin memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,70% (tertinggi di Kalimantan Selatan), dengan kepadatan penduduk padat (±6.800 jiwa/km²) dan luasan kawasan kumuh sebesar 508 hektar. Karakteristik demografis ini menciptakan basis massa pemilih yang rentan secara ekonomi dan sangat reseptif terhadap pola jaminan sosial informal jangka pendek. Di sisi lain, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada terakhir di Banjarmasin hanya menyentuh angka 56,13%, jauh di bawah Kota Banjarbaru yang mencapai 69,40%.

Disparitas ini mengindikasikan bahwa biaya mobilisasi politik di Banjarmasin semakin tinggi, di tengah situasi di mana akses elit lokal terhadap "kue" anggaran tingkat provinsi justru menyusut drastis akibat pemusatan sepuluh proyek strategis daerah di Banjarbaru pada tahun anggaran 2025. Selain itu fiskal daerah masih tergolong belum mandiri karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Thahir (2019) menjelaskan bahwa dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, kebijakan sosial pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal yang tersedia, sehingga ketika sumber penerimaan daerah melemah akibat pergeseran status administratif, maka kualitas layanan publik dan efektivitas program sosial di daerah tersebut turut terancam. Selain itu, pada akhir tahun anggaran, penyerapan anggaran di banyak daerah cenderung lambat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menumpuk di penghujung tahun (Djohan et al., 2024).

Kelangkaan sumber daya juga berimplikasi langsung pada meningkatnya biaya transaksi politik bagi para patron di Banjarmasin. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk beralih ke sumber daya alternatif yang lebih terlokalisasi seperti kontrol atas sektor ekonomi informal, retribusi pasar, dan perizinan usaha tingkat kota atau mengintensifkan praktik patronase transaksional langsung (*vote buying*) yang lebih masif. Perubahan basis sumber daya ini secara

inheren mengubah watak jaringan patronase itu sendiri. Relasi yang semula berbasis akses birokrasi vertikal (tingkat provinsi), dipaksa untuk bermetamorfosis menjadi jaringan yang lebih terlokalisasi, mengandalkan identitas kedekatan kota, serta mengoptimalkan ikatan personal dan emosional untuk menutupi melemahnya kapasitas logistik material patron. Berenschot (2018) menegaskan bahwa intensitas klientelisme justru lebih tinggi di ibu kota provinsi yang bergantung pada negara dibandingkan wilayah pedesaan, karena akses terhadap sumber daya anggaran pemerintah menjadi tulang punggung relasi patron-klien, sehingga ketika akses sumber daya formal menyempit, maka aktor-aktor lokal cenderung beralih pada jalur informal sebagai strategi adaptasi. Muhtadi (2019) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa jaringan patronase transaksional seperti vote buying di Indonesia tidak sekadar bersifat elektoral, melainkan mencerminkan struktur distribusi sumber daya informal yang terus beroperasi di luar siklus pemilihan dan semakin intensif ketika saluran birokrasi formal melemah. Aspinall et al. (2017) menambahkan bahwa para aktor lokal merespons penyempitan akses birokrasi dengan mengintensifkan strategi berbasis jaringan broker dan logika pasar, di mana loyalitas politik dipertukarkan melalui mekanisme informal yang lebih personal dan terlokalisasi.

Fenomena di Kota Banjarmasin ini pada akhirnya menawarkan sebuah realitas politik yang paradoksal. Para aktor kekuasaan lokal dihadapkan pada keharusan untuk merawat dan mempertahankan basis massa yang padat serta rentan, namun dilakukan di bawah tekanan menyempitnya akses logistik birokrasi dan anggaran akibat hilangnya privilege sebagai pusat pemerintahan provinsi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menciptakan pergeseran mendasar dalam lanskap kekuasaan lokal. Meskipun kebijakan ini secara yuridis telah memiliki landasan hukum yang kuat, dampaknya terhadap jaringan patronase politik yang selama ini beroperasi di Kota Banjarmasin belum dikaji secara mendalam dalam literatur ilmiah. Salah satu kesenjangan utama dalam penelitian terkait pemindahan ibu kota adalah minimnya studi yang secara spesifik mengkaji bagaimana hilangnya status ibu kota provinsi mempengaruhi struktur dan dinamika relasi patron-klien di kota yang ditinggalkan, khususnya Kota Banjarmasin.

Selama ini, kajian mengenai patronase politik di Indonesia lebih banyak berfokus pada konteks elektoral dan distribusi sumber daya di tingkat nasional atau pada daerah yang sedang mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, dinamika patronase di daerah yang mengalami penyusutan kapasitas fiskal dan administratif akibat pergeseran status administratif belum banyak dieksplorasi. Penelitian-penelitian terdahulu seperti Aspinall et al. (2017) dan Berenschot (2018) memang telah memberikan kerangka analisis yang kuat mengenai klientelisme dan patronase di Indonesia, namun tidak secara khusus membahas bagaimana jaringan patronase berevolusi ketika sumber daya birokrasi formal yang menjadi tulang punggungnya mengalami penyempitan struktural akibat kehilangan status ibu kota.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya dokumentasi sistematis mengenai strategi adaptasi yang dilakukan oleh para patron lokal di Kota Banjarmasin pascapemindahan ibu kota. Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (2025) menunjukkan bahwa Banjarmasin menghadapi tekanan fiskal yang signifikan, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi

di Kalimantan Selatan (6,70%) dan penyusutan anggaran provinsi yang drastis akibat pemusatan proyek strategis di Banjarbaru. Namun, bagaimana para aktor politik merespons kondisi ini dengan melakukan reorientasi jaringan patronase mereka, baik melalui intensifikasi patronase berbasis sumber daya lokal maupun melalui transformasi relasi patron-klien yang lebih terlokalisasi, belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka penelitian yang terpadu.

Kajian komparatif mengenai dinamika klientelisme di ibu kota provinsi Indonesia mengungkapkan bahwa intensitas patronase cenderung lebih tinggi di wilayah yang ekonominya bergantung pada negara dibandingkan daerah pedesaan, karena kontrol atas sumber daya anggaran pemerintah menjadi tulang punggung relasi patron-klien. Temuan ini secara langsung relevan dengan kondisi Banjarmasin pascapemindahan ibu kota, di mana penyusutan akses terhadap anggaran provinsi berpotensi mendestabilisasi jaringan patronase yang telah mapan. Senada dengan hal tersebut, Haryanto & Mahsun (2024) dalam studi mereka mengenai politik dan bisnis di kota-kota Indonesia menunjukkan bahwa distribusi proyek infrastruktur pemerintah merupakan arena utama patronase politik yang digerakkan oleh jaringan personal antara politisi dan kontraktor, dan bahwa pola ini tetap dominan terlepas dari perbedaan struktur ekonomi kota suatu temuan yang mengindikasikan betapa kuatnya institusionalisasi patronase dalam tata kelola lokal Indonesia. Lebih lanjut dalam Hidayat et al. (2025) ditegaskan bahwa patronase demokrasi di Indonesia memungkinkan elite politik mengintervensi proses kebijakan dengan memanfaatkan kekuasaan mereka, dan bahwa melemahnya akuntabilitas horizontal akibat klientelisme berdampak negatif terhadap outcome fiskal dan layanan publik daerah sebuah dinamika yang sangat relevan untuk memahami bagaimana Kota Banjarmasin merespons tekanan struktural akibat kehilangan status ibu kota provinsi. Ketiga temuan dari literatur ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan penelitian mengenai transformasi jaringan patronase dalam konteks penyusutan kapasitas administratif perlu segera diisi secara sistematis.

Lebih jauh lagi, pemetaan mengenai perubahan aktor, institusi, dan mekanisme distribusi dalam jaringan patronase di Banjarmasin pascapemindahan ibu kota belum dikaji secara holistik dan interdisipliner. Meskipun telah terjadi pergeseran signifikan dalam struktur anggaran, mutasi jabatan birokrasi, dan akses terhadap proyek pemerintah provinsi, belum ada studi yang secara sistematis mendokumentasikan bagaimana perubahan-perubahan ini mengubah watak jaringan patronase, dari yang semula berbasis akses birokrasi vertikal ke tingkat provinsi menjadi jaringan yang lebih terlokalisasi dan mengandalkan sumber daya alternatif seperti kontrol atas sektor ekonomi informal, retribusi pasar, dan perizinan usaha tingkat kota. Kekosongan inilah yang coba dijawab dalam penelitian ini, untuk memberikan kerangka konseptual dan empiris yang dapat digunakan dalam memahami transformasi kekuasaan lokal pascapemindahan ibu kota.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang relevan dan penting karena mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana jaringan patronase politik bertransformasi dalam konteks pascapemindahan ibu kota provinsi, dan bagaimana para aktor politik lokal di Kota Banjarmasin melakukan adaptasi strategis terhadap tekanan struktural yang ditimbulkan oleh hilangnya privilege sebagai pusat pemerintahan, melalui pendekatan yang berbasis lokal, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu pemindahan ibu kota sebagai fenomena politik yang memunculkan dinamika sosial, kelembagaan, dan kekuasaan, baik pada skala nasional maupun provinsi, dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan teoritis.

Penelitian oleh Asterina Nurhermaya dan Marisa Sugangga (2021) dalam Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapat Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat" memiliki persamaan dalam konteks kebijakan pemindahan ibu kota provinsi sebagai isu politik yang memunculkan dinamika pro-kontra di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* yang menitikberatkan pada analisis faktor dan regresi untuk membuktikan bahwa legitimasi pemerintah, citra kota, dan simbol kekuasaan menjadi penentu sikap masyarakat terhadap kebijakan relokasi. Perbedaannya terletak pada landasan teori dan fokus kajian, di mana penelitian tersebut mengukur opini publik melalui faktor-faktor politik umum, sedangkan penelitian ini menggunakan teori patronase politik yang menekankan pada jaringan informal, hubungan resiprositas, dan pertukaran loyalitas antaraktor politik pascapemindahan ibu kota.

Penelitian oleh Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora (2024) dalam Jurnal Kultura yang berjudul "Dampak Pemindahan Ibu Kota terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia" mengkaji aspek hukum dan kelembagaan pemindahan ibu kota negara melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan menyoroti pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai entitas pemerintahan baru. Persamaannya terletak pada konteks kebijakan pemindahan ibu kota yang memunculkan dinamika politik, namun perbedaannya tampak pada skala dan teori yang digunakan, di mana penelitian tersebut berfokus pada struktur kelembagaan baru di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana jaringan patronase politik di kota yang ditinggalkan, yakni Banjarmasin, bertahan dan beradaptasi pascapemindahan ibu kota provinsi.

Vadim Rossman (2017) dalam buku "Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation" menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota merupakan fenomena global dengan berbagai tipologi, mulai dari alasan fungsional, simbolik, hingga politik, menggunakan metode komparatif lintas negara. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam memandang pemindahan ibu kota sebagai keputusan yang mengubah peta kekuasaan, tetapi berbeda dalam pendekatan dan fokus analisis, sebab Rossman menyoroti pola makro dan tipologi perkotaan secara global, sedangkan penelitian ini menggunakan teori patronase James C. Scott yang lebih mikro dan sosiologis untuk menyoroti ikatan personal, kesetiaan, serta distribusi sumber daya antaraktor politik di Banjarmasin.

Schatz (2004) dalam Nationalism and Ethnic Politics yang berjudul "What Capital Cities Say About State and Nation Building" menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota sering menjadi strategi politik untuk membangun kembali identitas negara dan memutus basis kekuatan elit lama, menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Asia Tengah. Penelitian ini sejalan dalam mengangkat dampak politis pemindahan pusat pemerintahan terhadap struktur kekuasaan, namun berbeda fokus, karena Schatz menekankan upaya negara menciptakan loyalitas dan identitas nasional baru, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika jaringan patronase politik di level lokal Kota Banjarmasin yang mencoba bertahan dan bertransformasi pascapemindahan ibu kota.

Sriyono, Aprilia Rahmayani, dan Zahrotul Wahidah (2024) dalam Jurnal Kajian Pemerintah yang berjudul "Dampak Pengambilan Keputusan Pemerintah terkait Pemindahan

Ibu Kota Negara dalam Aspek Geografi, Sosial Politik, dan Ekonomi" menggunakan metode kajian kepustakaan untuk meninjau dampak pemindahan ibu kota negara dari tiga dimensi makro berbasis data sekunder. Penelitian ini memiliki keterkaitan dalam isu pemindahan ibu kota sebagai kebijakan strategis, tetapi berbeda dalam skala dan metode, karena penelitian tersebut berskala nasional dengan data sekunder, sedangkan penelitian ini berskala lokal pada tingkat provinsi dengan data primer melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku aktor politik.

Jika disintesiskan, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam memandang pemindahan ibu kota sebagai kebijakan strategis yang selalu memunculkan perubahan pada konfigurasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan legitimasi politik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, skala kajian, serta pendekatan teoritis yang digunakan: sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti opini publik, tata kelola kelembagaan, tipologi ibu kota, atau dampak nasional pemindahan pusat pemerintahan, sedangkan penelitian ini secara khusus menempatkan Kota Banjarmasin sebagai kota yang ditinggalkan dan menelaah bagaimana jaringan patronase politiknya bertahan serta beradaptasi setelah hilangnya status ibu kota provinsi.

Dari sintesis tersebut tampak bahwa keterbatasan utama penelitian sebelumnya adalah belum adanya kajian yang secara langsung menghubungkan pemindahan ibu kota dengan transformasi jaringan patron-klien pada level lokal, terutama dalam konteks penyusutan akses terhadap sumber daya birokrasi dan anggaran. Karena itu, posisi penelitian ini berada pada pengisian celah tersebut melalui pembacaan yang lebih mikro, sosiologis, dan empiris atas strategi adaptasi elit lokal, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan kajian patronase politik di daerah yang kehilangan status administratif strategis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur pemindahan ibu kota, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang keberlanjutan kekuasaan informal dalam situasi perubahan institusional.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian jaringan patronase politik lokal karena menempatkan pemindahan ibu kota provinsi sebagai faktor yang mengubah struktur relasi kekuasaan, bukan sekadar sebagai latar kebijakan administratif. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang banyak membahas klientelisme secara umum atau pemindahan ibu kota pada skala nasional, penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana hilangnya status ibu kota memengaruhi sumber daya, jalur distribusi pengaruh, dan pola relasi patron-klien di Kota Banjarmasin.

Salah satu kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pemetaan transformasi jaringan patronase secara lebih sistematis berdasarkan aktor, sumber daya, arah pertukaran, dan bentuk ketergantungan yang muncul pascapemindahan ibu kota. Penelitian seperti Aspinall et al. (2017), Berenschot (2018), dan Muhtadi (2019) memang telah menjelaskan mekanisme klientelisme dan vote buying di Indonesia, tetapi belum secara khusus menelusuri perubahan jaringan patronase ketika basis sumber daya birokrasi formal menyempit akibat pergeseran status administratif.

Selain itu, kebaruan lain yang diangkat adalah pada fokus terhadap peran pemerintah daerah khususnya Kesbangpol Kota Banjarmasin dalam merespons dinamika jaringan patronase politik. Hampir seluruh penelitian terdahulu yang dikaji, seperti penelitian oleh Hidayat (2025), maupun Putrayasa dkk. (2024), tidak secara eksplisit meneliti bagaimana strategi resolusi konflik

dijalankan oleh lembaga lokal dalam merespons gejolak sosial akibat kebijakan besar seperti pemindahan ibu kota. Dalam penelitian ini, pendekatan kelembagaan dan kebijakan Kesbangpol menjadi fokus utama, yang menjadikan studi ini memiliki nilai praktis dan aplikatif yang tinggi bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada masih terbatasnya kajian yang menggunakan konteks Kota Banjarbaru sebagai studi kasus. Berbeda Gunawan Aji dkk. (2023) yang menyoroti Kalimantan Timur secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi lokasi baru dalam peta riset pemindahan ibu kota di Indonesia, khususnya pada tingkat provinsi, yang sebelumnya belum banyak dijelajahi dalam literatur ilmiah.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi fenomenologis dan studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam pengalaman sosial, psikologis, dan budaya masyarakat lokal yang terdampak. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi seperti Saraswati & Adi (2022) yang hanya mengkaji pemindahan ibu kota menggunakan analisis SWOT secara makro atau penelitian kuantitatif berbasis persepsi seperti yang dilakukan Nurhermaya & Sugangga (2021).

Kebaruan lain juga terletak pada penggunaan triangulasi narasumber dari pemerintah, masyarakat, hingga media dokumentasi lokal, yang memungkinkan analisis yang lebih berimbang antara kebijakan dan respons warga. Penelitian lain seperti oleh Satriyati (2023) hanya mengandalkan data sekunder dan wawancara umum, tanpa fokus mendalam pada aktor penyelesaian konflik seperti Kesbangpol. Sementara beberapa penelitian seperti oleh Farida & Bagus (2023) atau Hidayat (2025) lebih memfokuskan pada konflik agraria atau masyarakat adat, penelitian ini tidak terbatas pada isu lahan atau budaya, melainkan melihat konflik sosial dalam kerangka yang lebih luas dan kontekstual, yang mencakup semua lapisan masyarakat perkotaan.

Terakhir, penelitian ini memperkenalkan kerangka jaringan patronase politik lokal dalam pemindahan ibu kota provinsi yang bisa direplikasi di wilayah lain, dan sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan lokal berbasis realitas masyarakat yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi transisi besar akibat relokasi pusat pemerintahan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin akibat pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam dinamika jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin pascapemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bentuk jaringan patronase, faktor penghambat transformasinya, serta upaya elit politik dalam mempertahankan jaringan tersebut di tengah perubahan status administratif wilayah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi faktual di lapangan, pola hubungan antaraktor politik, serta penyesuaian yang terjadi setelah pemindahan ibu kota.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan fokus pada beberapa lokasi yang berkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Komunitas Sekolah Rakyat, dan masyarakat umum. Dengan memilih lokasi-lokasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang representatif mengenai dinamika politik lokal, perubahan akses sumber daya, serta hubungan antara aktor pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan jaringan patronase.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, karena informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap isu yang diteliti. Informan penelitian meliputi unsur Bappeda/Bappelitbangda Kota Banjarmasin, Kesbangpol Kota Banjarmasin, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Komunitas Sekolah Rakyat, dan masyarakat lokal. Untuk informan dari kalangan masyarakat, digunakan pula teknik *snowball sampling* agar peneliti dapat menjangkau narasumber yang relevan dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai dinamika patronase politik yang terjadi di lapangan.

Untuk meningkatkan transparansi metodologi, informan penelitian dibedakan ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat kedekatan, keterlibatan, dan kapasitasnya dalam menyediakan data penelitian. Pembagian ini membantu memastikan bahwa data yang dihimpun tidak hanya berasal dari sumber yang memahami objek penelitian secara langsung, tetapi juga dari pihak yang mampu mengonfirmasi dan melengkapi temuan lapangan.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin karena berada paling dekat dengan pengelolaan stabilitas politik, komunikasi publik, dan relasi antaraktor politik di daerah. Informan utama adalah pejabat Bappeda/Bappelitbangda Kota Banjarmasin dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan karena keduanya menyediakan data inti mengenai perencanaan pembangunan, alur kebijakan, perubahan distribusi sumber daya, dan dinamika birokrasi pascapemindahan ibu kota. Adapun informan pendukung adalah Komunitas Sekolah Rakyat dan masyarakat lokal yang dipilih melalui snowball sampling karena berperan memberikan perspektif warga terdampak, menguji konsistensi informasi dari pejabat pemerintah, serta memperkaya pemahaman tentang dampak sosial-politik yang dirasakan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih luas dan tetap terarah pada fokus penelitian. Observasi partisipatif moderat digunakan untuk mengamati langsung situasi di lapangan, pola interaksi informal, serta manifestasi hubungan patron-klien yang masih berlangsung di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui dokumen resmi, laporan, data statistik, foto, serta arsip kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota dan dinamika jaringan patronase di Banjarmasin.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi analitis agar memudahkan peneliti melihat pola hubungan antaraktor politik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap melalui verifikasi silang terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis ini juga diarahkan pada tiga dimensi teori patronase Scott, yaitu asimetris pertukaran, sifat tatap muka, dan sifat luwes, sehingga perubahan jaringan patronase dapat dipahami secara lebih tajam dan terstruktur.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai dinamika jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin pascapemindahan ibu kota serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian politik lokal dan kebijakan pemerintahan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA JARINGAN PATRONASE POLITIK DI KOTA BANJARMASIN PASCAPEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai dinamika jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin pascapemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru. Analisis dilakukan menggunakan teori patronase James C. Scott (1972) yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu asimetris pertukaran (*asymmetrical exchange*), sifat tatap muka (*face-to-face character*), dan sifat luwes (*flexibility*). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pembahasan penelitian disajikan sebagai berikut.

3.1 Dimensi Asimetris Pertukaran

Dalam teori patronase James C. Scott (1972), dimensi asimetris pertukaran menunjukkan bahwa hubungan antara patron dan klien tidak berlangsung dalam posisi yang setara, melainkan selalu terdapat pihak yang memiliki sumber daya, akses, dan pengaruh yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, ketimpangan tersebut tampak jelas pada pergeseran pusat distribusi sumber daya politik dan administratif. Pemindahan ibu kota telah mengubah posisi tawar aktor-aktor lokal, karena akses terhadap proyek strategis, anggaran pembangunan, dan jalur birokrasi kini lebih terkonsentrasi di Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan baru. Kondisi ini menyebabkan jaringan patronase di Banjarmasin tidak lagi bertumpu pada akses ke pusat kekuasaan provinsi sebagaimana sebelumnya, melainkan mulai bergeser ke sumber daya yang lebih lokal dan terbatas.

Hasil wawancara dengan Bapak Amin, salah satu tokoh masyarakat Banjarmasin, pada Senin, 19 Januari 2026, mempertegas adanya ketimpangan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa sejak ibu kota dipindahkan ke Banjarbaru, masyarakat memang tidak banyak dilibatkan dalam prosesnya. Menurutnya, keputusan seperti itu lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dekat dengan pemerintah dan memiliki akses lebih besar, sedangkan masyarakat hanya menerima hasil akhirnya saja. Beliau juga menilai bahwa masyarakat asli Banjarmasin sebenarnya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota karena keputusan tersebut berpotensi memicu ketimpangan antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sekaligus mencerminkan jarak antara masyarakat biasa dan pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam relasi patronase, pihak yang lebih tinggi dalam struktur kekuasaan tetap dapat menentukan arah kebijakan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Pengamatan langsung peneliti terhadap Bapak Amin yang tinggal di sekitar Jalan Gatot Subroto, Kota Banjarmasin, pada 19 Januari 2026 menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan jalur utama dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Namun, peneliti tidak menemukan papan informasi, spanduk sosialisasi, atau pengumuman resmi terkait pemindahan

ibu kota dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kota Banjarbaru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses informasi bagi masyarakat masih sangat terbatas, sehingga warga cenderung hanya menerima dampak akhir kebijakan tanpa keterlibatan yang memadai dalam prosesnya. Situasi tersebut menguatkan temuan bahwa pertukaran dalam jaringan patronase berlangsung secara tidak seimbang, di mana keuntungan politik lebih banyak mengalir kepada aktor yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, sedangkan masyarakat di Banjarmasin berada pada posisi subordinat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan pusat administrasi, tetapi juga menegaskan adanya ketimpangan dalam pertukaran di jaringan patronase politik. Dalam perspektif Scott (1972), kondisi ini mencerminkan dimensi asimetris pertukaran, yaitu ketika pihak yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan di Banjarbaru memperoleh akses dan keuntungan politik yang lebih besar, sedangkan masyarakat Banjarmasin berada pada posisi yang lebih lemah dan kurang memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan.

3.2 Dimensi Sifat Tatap Muka

Dalam teori patronase James C. Scott (1972), dimensi sifat tatap muka menekankan pentingnya hubungan langsung antara patron dan klien. Hubungan ini tidak semata-mata dibangun melalui mekanisme formal, tetapi melalui interaksi personal yang berulang, kedekatan sosial, dan komunikasi langsung yang membentuk rasa saling percaya. Dalam konteks Kota Banjarmasin pascapemindahan ibu kota, dimensi ini masih terlihat kuat dalam praktik komunikasi publik, sosialisasi kebijakan, kegiatan kemasyarakatan, serta forum-forum keagamaan dan sosial yang melibatkan elit politik dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun pusat pemerintahan provinsi telah bergeser ke Banjarbaru, hubungan patronase di Banjarmasin masih dipertahankan melalui kedekatan fisik dan interaksi langsung dengan basis sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan intensitas komunikasi publik sekaligus memperluas sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini dilakukan melalui forum-forum kelembagaan, kegiatan politik, serta pendekatan informal kepada tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan aktor lokal lainnya. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa relasi patronase tetap dijaga melalui mekanisme tatap muka yang intensif, karena kedekatan langsung dengan masyarakat masih dianggap efektif untuk memelihara dukungan dan loyalitas politik.

Pengamatan di Kantor Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin pada 13 Januari 2026 menunjukkan bahwa aktivitas kantor berjalan normal dengan pegawai berada di ruang kerja masing-masing. Peneliti hanya menemukan papan informasi yang berisi kebijakan pemerintah kota dan jadwal kegiatan yang tampak pada saat observasi dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik memang ada, tetapi belum selalu tampil secara mencolok secara visual. Meski demikian, fakta bahwa kantor tersebut tetap menjadi ruang aktif untuk penyebaran informasi menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat masih dijaga sebagai bagian dari strategi mempertahankan jaringan patronase.

Selain itu, temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan tetap menjadi arena penting bagi elit politik Banjarmasin untuk mempertahankan

kedekatan dengan masyarakat. Forum seperti haul ulama, majelis taklim, bakti sosial, kegiatan RT/RW, serta acara sosial lainnya menjadi ruang tatap muka yang memperkuat ikatan emosional antara patron dan klien. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi sifat tatap muka masih sangat relevan dalam mempertahankan jaringan patronase di Banjarmasin, karena hubungan politik lokal tetap membutuhkan kehadiran langsung, dialog, dan interaksi sosial yang intensif.

3.3 Dimensi Sifat Luwes

Dalam teori patronase James C. Scott (1972), dimensi sifat luwes menunjukkan bahwa jaringan patronase tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam penelitian ini, sifat luwes terlihat dari kemampuan elit politik Banjarmasin dalam mengalihkan strategi patronase dari yang sebelumnya bertumpu pada akses ke pusat pemerintahan provinsi menjadi patronase yang lebih berbasis pada sumber daya lokal. Pergeseran ini tampak melalui penguatan citra Banjarmasin sebagai kota niaga, pemanfaatan sektor perdagangan dan jasa, serta penyaluran bantuan sosial dan dukungan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang masih menjadi basis dukungan politik.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Banjarmasin menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin masih lebih banyak dan kepadatan penduduk serta jumlah penduduk miskin juga masih menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Ia juga menjelaskan bahwa lapangan kerja di Banjarmasin masih lebih banyak, meskipun kantor pemerintahan sudah banyak berpindah ke Banjarbaru. Menurutnya, pelabuhan di Kota Banjarmasin tetap menjadi pusat perekonomian dalam perdagangan dan jasa, sehingga satu-satunya cara untuk mempertahankan jaringan patronase adalah dengan memperkuat citra Banjarmasin sebagai kota niaga. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa jaringan patronase tidak hilang, melainkan menyesuaikan diri dengan sumber daya ekonomi yang masih tersedia di tingkat lokal.

Data sekunder juga memperkuat temuan tersebut. Dalam tabel mengenai dimensi sifat luwes, terlihat bahwa elit lokal mendorong wisata sungai melalui bantuan sarana, promosi, dan dukungan komunitas klotok serta pasar terapung. Selain itu, tokoh politik melalui dana aspirasi juga memberikan bantuan kepada kelompok usaha mikro berupa sertifikasi halal, pelatihan digital, dan rumah kemasan. Temuan ini menunjukkan bahwa patronase di Banjarmasin menjadi lebih adaptif karena menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dimensi sifat luwes tampak jelas dalam cara jaringan patronase mempertahankan relevansinya meskipun status ibu kota telah berpindah.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaringan patronase di Banjarmasin tidak runtuh setelah pemindahan ibu kota, melainkan bertransformasi menjadi lebih lokal, fleksibel, dan berorientasi pada sumber daya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Scott (1972), kondisi ini merupakan bentuk keluwesan patronase, yaitu kemampuan jaringan untuk menggeser saluran distribusi dari proyek provinsi ke program kota tanpa kehilangan fungsi pertukaran yang menjadi dasarnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru tidak mengakibatkan runtuhnya jaringan patronase politik di Banjarmasin, melainkan mendorong reorganisasi yang adaptif dan dinamis. Temuan utama ini memperlihatkan bahwa tiga dimensi teori patronase Scott (1972), yaitu asimetris pertukaran, sifat tatap muka, dan sifat luwes, bekerja secara simultan dalam menjelaskan perubahan relasi kekuasaan lokal pascapemindahan ibu kota. Pertama, dimensi asimetris pertukaran terlihat dari bergesernya pusat distribusi sumber daya provinsi ke Banjarbaru, sehingga akses terhadap proyek strategis, anggaran pembangunan, dan jabatan birokrasi menjadi lebih terkonsentrasi di pusat pemerintahan baru. Kedua, dimensi sifat tatap muka tampak dari upaya elit politik dan pemerintah daerah yang tetap menjaga hubungan langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi, forum kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan. Ketiga, dimensi sifat luwes terlihat dari kemampuan jaringan patronase Banjarmasin menyesuaikan diri dengan kondisi baru melalui pemanfaatan sumber daya kota, bantuan sosial, serta program ekonomi lokal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Berenschot (2018) yang menegaskan bahwa patronase akan tetap hidup selama masih ada distribusi sumber daya yang dapat dipertukarkan, serta memperkuat argumen Aspinall et al. (2017) dan Muhtadi (2019) bahwa hubungan patron-klien di Indonesia tidak semata-mata berhenti pada momentum elektoral, tetapi terus berfungsi dalam kehidupan politik sehari-hari. Dalam konteks Banjarmasin, pemindahan ibu kota justru memperlihatkan bahwa jaringan patronase tidak bergantung secara mutlak pada status administratif, melainkan pada kemampuan aktor lokal untuk mengelola kedekatan sosial, sumber daya ekonomi, dan komunikasi politik secara fleksibel.

Berbeda dengan studi-studi yang lebih banyak menyoroti pemindahan ibu kota dari sisi hukum, tata kelola, atau opini publik, penelitian ini menampilkan dimensi mikro dari perubahan kekuasaan lokal, yakni bagaimana aktor politik di kota yang ditinggalkan beradaptasi untuk mempertahankan pengaruhnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya persoalan administratif dan infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan jaringan sosial-politik yang telah lama terbangun. Jaringan patronase di Banjarmasin terbukti mampu bertahan karena mengandalkan kedekatan langsung dengan warga, penguatan basis sosial, dan penyesuaian saluran distribusi sumber daya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat pergeseran besar dalam struktur pemerintahan daerah, penelitian ini menemukan bahwa jaringan patronase politik di Banjarmasin tetap eksis dengan bentuk yang lebih terlokalisasi. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap dampak pemindahan ibu kota tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan pemahaman atas relasi sosial, strategi adaptasi elit, serta ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas agar perubahan politik tidak menghasilkan ketimpangan pengaruh yang semakin dalam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap aktor pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, serta dengan menggunakan teori patronase James C. Scott (1972) sebagai kerangka analisis utama, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, pada dimensi asimetris pertukaran, pemindahan ibu kota provinsi telah menggeser pusat distribusi sumber daya politik dan administratif dari Banjarmasin ke Banjarbaru, sehingga akses terhadap proyek strategis, anggaran pembangunan, dan jalur birokrasi kini lebih terkonsentrasi di pusat pemerintahan baru. Kondisi ini menempatkan masyarakat Banjarmasin pada posisi yang lebih lemah dalam relasi patronase, karena arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh aktor yang dekat dengan pusat kekuasaan, sementara ruang pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

Kedua, pada dimensi sifat tatap muka, jaringan patronase di Banjarmasin tetap dipertahankan melalui hubungan langsung antara elit politik, pemerintah daerah, dan masyarakat. Intensitas komunikasi publik, sosialisasi kebijakan, serta keterlibatan dalam forum keagamaan dan kemasyarakatan seperti haul ulama, majelis taklim, bakti sosial, dan kegiatan RT/RW menunjukkan bahwa kedekatan personal dan interaksi tatap muka masih menjadi instrumen utama untuk memelihara loyalitas politik, sekalipun pusat pemerintahan provinsi telah berpindah ke Banjarbaru.

Ketiga, pada dimensi sifat luwes, jaringan patronase di Banjarmasin terbukti mampu beradaptasi dengan mengalihkan basis sumber dayanya dari akses birokrasi provinsi menuju sumber daya lokal, seperti penguatan citra Banjarmasin sebagai kota niaga, pengembangan wisata sungai, serta penyaluran bantuan sosial dan ekonomi melalui dana aspirasi kepada pelaku usaha mikro. Fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa elit politik Banjarmasin mampu menggeser saluran distribusi sumber daya tanpa kehilangan fungsi pertukaran yang menjadi dasar relasi patron-klien.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyebabkan runtuhnya jaringan patronase politik di Kota Banjarmasin, melainkan mendorongnya bertransformasi menjadi lebih lokal, fleksibel, dan adaptif. Ketiga dimensi teori patronase Scott, yaitu asimetris pertukaran, sifat tatap muka, dan sifat luwes, bekerja secara simultan dalam menjelaskan bagaimana aktor politik di kota yang ditinggalkan tetap mampu mempertahankan pengaruhnya. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan status administratif tidak selalu melemahkan patronase, melainkan dapat mendorong reorganisasi strategi kekuasaan lokal yang lebih berorientasi pada sumber daya dan kedekatan sosial di tingkat akar rumput.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal waktu, cakupan wilayah, dan ketersediaan data lapangan. Studi ini hanya berfokus pada Kota Banjarmasin sebagai lokasi yang terdampak langsung oleh pemindahan ibu kota provinsi, sehingga belum sepenuhnya menjangkau wilayah lain yang juga mengalami pengaruh serupa, baik Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan baru maupun daerah sekitar yang terhubung dalam jejaring sosial-politik dan ekonomi. Selain itu, tidak semua aktor yang relevan, seperti unsur pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat tertentu, dapat diwawancarai secara langsung karena keterbatasan akses dan waktu penelitian. Keterbatasan tersebut menyebabkan analisis belum dapat menggambarkan dinamika patronase politik secara utuh dari seluruh sudut pandang yang terlibat.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work).* Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai transformasi jaringan patronase politik pascapemindahan ibu kota melalui pendekatan komparatif antara Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan wilayah

lain yang terdampak. Kajian lanjutan juga perlu menelusuri lebih jauh perubahan aktor, sumber daya, dan mekanisme distribusi politik setelah bergesernya status ibu kota, agar pola adaptasi elite lokal dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian mendatang dapat menelaah efektivitas strategi pemerintah daerah, khususnya peran lembaga seperti Kesbangpol, dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan merespons perubahan relasi kekuasaan akibat pergeseran status administratif. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Pendalaman lebih lanjut juga diperlukan terhadap strategi adaptasi ekonomi dan sosial yang dijalankan pemerintah daerah dalam merespons penyusutan akses sumber daya birokrasi provinsi, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan jaringan patronase yang inklusif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji penggunaan teknologi partisipatif dalam proses perencanaan kebijakan sebagai alternatif solusi untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran atas izin, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada para narasumber, masyarakat Kota Banjarmasin, serta semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan informasi berharga demi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

Tanpa bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, *17*(1), 1–27. https://doi.org/10.1017/jea.2016.31

Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, *51*(12), 1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Djohan, D., Khairi, H., & Alma'arif. (2024). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Intelegensia Media.

Farida, A., & Bagus, M. (2023). Implementasi paradigma green constitution dalam pembangunan Ibu Kota Negara menuju smart forest city. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 104–109. https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/21

Gunawan Aji, Z., Arfani, Z., Sari, A. M., & Septiani, R. (2023). Dampak pemindahan ibukota negara baru terhadap ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *1*(5), 1–8. https://jurnal.kultura.ac.id/index.php/kultura/article/view/474

Hanif, H. (2009). Politik klientelisme baru dan dilema demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *12*(3), 327–351. https://doi.org/10.22146/jsp.10974

Haryanto, & Mahsun, M. (2024). Business and politics in urban Indonesia: Patrimonialism, oligarchy and the state in two towns. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *43*(2), 177–197. https://doi.org/10.1177/18681034241264574

Hidayat, S., Tambunan, D., & Haning, Y. (2025). Unjust by default: The political economy of Indonesia's local government policy on infrastructure development. *Asian Journal of Comparative Politics*, *10*(1), 152–170. https://doi.org/10.1177/20578911241260442

Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3

Nurhermaya, A., & Sugangga, M. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pendapat pemindahan ibu kota Jawa Barat. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *10*(3), 123–131. https://doi.org/10.32315/jlbi.v10i03.51

Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2024). Dampak pemindahan ibu kota terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *2*(10), 643–654. https://jurnal.kultura.ac.id/index.php/kultura/article/view/474

Rohmah, E. I. (2025). Praktik patronase dalam pemilu dan implikasinya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, *3*(1), 91–111. https://doi.org/10.14421/nn2y2916

Rossman, V. (2017). *Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315735061

Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *6*(2), 4042–4052. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086

Satriyati, E. (2023). Optimalisasi potensi modal budaya nusantara sebagai industri kreatif pendorong daya saing ibukota baru Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 167–170. https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/32

Saputra, D. Y., Nurdin, I., & Sinaga, J. B. B. (2025). Studi terhadap pemikiran Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. mengenai ilmu pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *11*(1), 98–109. https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21467

Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, *66*(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

Schatz, E. (2004). What capital cities say about state and nation building. *Nationalism and Ethnic Politics*, *9*(4), 111–140. https://doi.org/10.1080/13537110390444140

Sriyono, S., Rahmayani, A., & Wahidah, Z. (2024). Dampak pengambilan keputusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara dalam aspek geografi, sosial politik, dan ekonomi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *10*(1), 22–28. https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15802

Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *2*(2), 1–12. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909

Indonesia, Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779. https://jdih.bpkp.go.id/produkhukum/2077/detail

Indonesia, Pemerintah Pusat. (1956). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51157/uu-no-25-tahun-1956